



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 182 TAHUN 2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi serta dampak positif terhadap hasil Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebagai panduan dalam melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2024 terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

KEDUA : Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. instrumen evaluasi eksternal oleh Evaluator Nasional, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi reformasi birokrasi;
- b. materi/substansi pelaporan evaluasi eksternal oleh Evaluator Meso, yang digunakan oleh evaluator meso dalam melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi dan menjadi tanggung jawabnya;
- c. dokumen kelengkapan evaluasi internal, yang digunakan oleh Evaluator Internal dalam mendukung evaluasi internal reformasi birokrasi di instansinya; dan
- d. penetapan tema dan fokus Reformasi Birokrasi Tematik tahun 2024.

KETIGA : Instrumen evaluasi eksternal oleh Evaluator Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, yang memuat:

- a. lembar kerja evaluasi Reformasi Birokrasi;

- b. kriteria Penilaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik;
- c. definisi Operasional Indikator Keberhasilan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
- d. kriteria Penilaian Reformasi Birokrasi Tematik;
- e. pemetaan Peran Kementerian/Lembaga dalam Reformasi Birokrasi Tematik Tematik;
- f. mekanisme sanggah hasil evaluasi sementara.

KEEMPAT : Menetapkan lokus evaluasi untuk indikator Meso sebagai berikut:

- a. relevan untuk dilakukan pengukuran sesuai dengan karakteristik organisasi dan kinerja masing-masing instansi pemerintah.
- b. Instansi pemerintah yang entitas pelaporan anggarannya disatukan, maka dapat menggunakan nilai yang sama.

KELIMA : Bagi instansi pemerintah yang memiliki karakteristik khusus, selanjutnya diatur pada SOP yang akan ditetapkan.

KEENAM : Materi atau substansi pelaporan evaluasi eksternal oleh Evaluator Meso sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Dokumen kelengkapan evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Menetapkan 4 (empat) tema dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. pengentasan kemiskinan;
- b. realisasi investasi;
- c. digitalisasi pemerintahan; dan

d. prioritas aktual Presiden.

KESEMBILAN : Tema Digitalisasi Pemerintahan tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN huruf c berfokus pada Penanganan Stunting.

KESEPULUH : Tema Prioritas Aktual Presiden sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN huruf d berfokus pada Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi.

KESEBELAS : Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2024 bagi Kementerian/Lembaga didasarkan pada pemetaan peran pada masing-masing tema sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN. Peran tersebut adalah:

- a. *implementing agency* merupakan Kementerian/Lembaga yang mengampu program dan kegiatan terkait tema berdasarkan perencanaan pembangunan;
- b. *enabling agency* merupakan Kementerian/Lembaga yang tidak mengampu secara langsung terhadap program dan kegiatan terkait tema namun memiliki peran dalam percepatan pencapaian tema; serta
- c. *supporting agency* merupakan Kementerian/Lembaga yang tidak memiliki tugas dan fungsi langsung yang terkait tema, namun dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan program terkait tema.

KEDUABELAS : Mekanisme sanggah hasil evaluasi sementara sebagaimana disebutkan dalam diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. S. H.' or similar initials.

Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2024

INSTRUMEN EVALUASI EKSTERNAL OLEH EVALUATOR NASIONAL

I. Lembar Kerja Evaluasi (Reformasi Birokrasi) RB Tahun 2024

a. Lembar Kerja Evaluasi RB Kementerian/Lembaga (K/L)

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Penjelasan
RB General		100,00		
A.	Strategi Pelaksanaan RB General	10,00		

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	0-100	Menilai kualitas rencana aksi Pembangunan RB General yang dilakukan oleh K/L, misalnya legal hukum RB General yang dikeluarkan, bentuk kolaborasi yang dibangun, serta strategi-strategi atas kegiatan utama yang ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	0-100	Menilai kualitas implementasi rencana aksi Pembangunan RB General yang telah disusun dengan menganalisis capaian rencana aksi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional. Nilai Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General dipengaruhi oleh Nilai Kualitas Rencana Aksi Pembangunan RB General.
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB			40,00		
HARD ELEMENT (Sasaran 1)			33,00		
KEBIJAKAN PERCEPATAN			33,00		

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2,00	0-100	Mengukur tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0-5	Mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	3.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	1-5	Mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
	4.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,00	0-3	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM secara rata-rata tiga tahun terakhir pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
					(Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
5.		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	4,00	0-100	Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja yang baik dan mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBN pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
6.		Indeks Perencanaan Pembangunan	2,00	0-100	Mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Penjelasan	
	7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,00	0-5	Mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,00	0-100	Mengukur kualitas implementasi penyelenggaraan kearsipan pada K/L dalam rangka transformasi digital kearsipan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Arsip Nasional Republik Indonesia).
	9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2,00	0-100	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Keuangan).
	10.	Indeks Pengelolaan Aset	2,00	1-4	Mengukur kualitas kinerja di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) meliputi pengelolaan, kepatuhan, pengawasan, dan pengendalian, serta keandalan administrasi pada K/L selaku pengguna barang. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Keuangan).

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	11.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	1-5	Mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR! sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	12.	Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	0-100	Mengukur kualitas kebijakan publik yang ditetapkan oleh K/L pada proses perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Administrasi Negara).
	13.	Indeks Reformasi Hukum	1,50	0-100	Mengukur reformasi hukum pada K/L dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
	14.	Indeks Pembangunan Statistik	1,50	1-5	Mengukur kualitas kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pusat Statistik).

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Penjelasan	
	15.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,00	0-100	Mengukur kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pada K/L baik dari aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, maupun sistem pengadaan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)			7,00		
KEBIJAKAN PERCEPATAN			7,00		
	1.	Indeks Sistem Merit	4,00	0-410	Mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Aparatur Sipil Negara).
	2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,00		Mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman RI).
	a.	Indeks Pelayanan Publik	1,50	0-5	
	b.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0-100	

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Penjelasan
C.	Capaian Sasaran Strategis RB	50,00		
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)	28,00		
	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9,00	1-5	Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan K/L dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	2. Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00		Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas K/L dalam mengelola kinerja. Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu: 1) Capaian Prioritas Nasional, dan 2) Capaian Indikator Kinerja Utama.

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
			a. Capaian Prioritas Nasional	3,00	0-100	Menghitung kinerja efektivitas <i>output</i> K/L dengan membandingkan capaian dan target RO yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Nilai Capaian Prioritas Nasional dipengaruhi oleh Nilai SAKIP dan Capaian Rencana Kerja Pemerintah.
			b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	7,00	0-100	Menghitung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan pada K/L dengan membandingkan Jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional. Nilai Capaian IKU dipengaruhi oleh Nilai SAKIP dan Capaian Rencana Kerja Pemerintah.
	3.		Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00		Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas K/L dalam mengelola keuangan negara. Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu: 1) Opini BPK, dan 2) Tindak

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
						Lanjut Rekomendasi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
		a.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5,00	WTP-WDP-TW-TMP	Mengukur tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
		b.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0-100	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)				22,00		
		1.	Indeks BerAKHLAK	4,00	0-100	Mengukur tingkat kematangan implementasi <i>core value</i> ASN BerAKHLAK. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	2.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10,00	0-100	Mengukur tingkat integritas organisasi pada K/L. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan K/L dalam memetakan risiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Pemberantasan Korupsi).
	3.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari K/L. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN			100,00		
KOEFISIEN					Koefisien adalah penambahan atau pengurangan atas hasil RB General yang didasarkan pada beberapa variabel.
TOTAL RB GENERAL					
RB Tematik			10,00		

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Penjelasan
A. Capaian RB Tematik				
1.	Pengentasan Kemiskinan	2,00	0-100	Evaluasi RB Tematik dilakukan kepada K/L dengan mengukur: a. strategi pembangunan (upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi) b. capaian indikator dampak RB Tematik.
2.	Realisasi Investasi	2,00	0-100	
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2,00	0-100	
4.	Prioritas Aktual Presiden			
a.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	2,00	0-100	Proporsi perhitungan dua indikator tersebut didasarkan pada pemetaan peran RB Tematik dengan rincian sebagai berikut: a. <i>Implementing Agency</i> (40% - 60%) b. <i>Enabling Agency</i> (50% - 50%) c. <i>Supporting Agency</i> (60% - 40%)
b.	Pengendalian Inflasi	2,00	0-100	
TOTAL RB TEMATIK		10,00		
TOTAL NILAI RB		110,00		

Keterangan:

- Dalam hal instansi pemerintah tidak ditetapkan sebagai lokus evaluasi K/L Meso, maka penilaian RB General tidak mengikutsertakan indikator terkait.

- Dalam hal terdapat indikator yang tidak dilakukan evaluasi pada tahun ini, maka nilai indikator yang digunakan adalah nilai tahun terakhir.

b. Lembar Kerja Evaluasi RB Pemerintah Provinsi

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
RB General				100,00		
A.	Strategi Pelaksanaan RB General			10,00		
	1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General		3,00	0-100	Menilai kualitas rencana aksi Pembangunan RB General yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda), misalnya legal hukum RB General yang dikeluarkan, bentuk kolaborasi yang dibangun, serta strategi-strategi atas kegiatan utama yang ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General		7,00	0-100	Menilai kualitas implementasi rencana aksi Pembangunan RB General yang telah disusun dengan menganalisis capaian rencana aksi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional. Nilai Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General dipengaruhi oleh Nilai Kualitas Rencana Aksi Pembangunan RB General.

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Penjelasan	
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40,00			
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)	32,00			
	KEBIJAKAN PERCEPATAN	32,00			
	1.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3,00	0-5	Mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	2.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	1-5	Mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
	3.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3,00	0-3,5	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM secara rata-rata tiga tahun terakhir pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan	
		4.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	4,00	0-100	Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
		5.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,50	0-100	Mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).
		6.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,00	0-5	Mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
		7. Tingkat Digitalisasi Arsip	2,50	0-100	Mengukur kualitas implementasi penyelenggaraan kearsipan pada Pemda dalam rangka transformasi digital kearsipan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Arsip Nasional Republik Indonesia).
		8. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,50	1-5	Mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR! sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
		9. Indeks Kualitas Kebijakan	2,00	0-100	Mengukur kualitas kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pemda pada proses perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Administrasi Negara).
		10. Indeks Reformasi Hukum	2,00	0-100	Mengukur reformasi hukum pada Pemda dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
		11. Indeks Pembangunan Statistik	2,00	1-5	Mengukur kualitas kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pusat Statistik).
		12. Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,50	0-100	Mengukur kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
		SOFT ELEMENT (Sasaran 2)	8,00		
		KEBIJAKAN PERCEPATAN	8,00		
		1. Indeks Sistem Merit	4,00	0-410	Mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Aparatur Sipil Negara).
		2. Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	4,00		Mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman RI).
		a. Indeks Pelayanan Publik	2,00	0-5	

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
		b.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2,00	0-100	
C. Capaian Sasaran Strategis RB				50,00		
HARD ELEMENT (Sasaran 1)				28,00		
		1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9,00	1-5	Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan Pemda dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
		2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00		Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas Pemda dalam mengelola kinerja. Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu: 1) Capaian IKU Makro, dan 2) Capaian IKU Non Makro
		a.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Makro	4,00	0-100	Menghitung capaian IKU Makro dengan membandingkan realisasi indikator makro dengan target nasional;

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
			b. Capaian IKU Non Makro	6,00	0-100	Menghitung capaian IKU Non Makro dengan membandingkan antara jumlah IKU Non Makro yang telah mencapai >90% dengan jumlah IKU Non Makro pemerintah provinsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional. Capaian IKU Non Makro dipengaruhi oleh Nilai SAKIP.
		3.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00		Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas Pemda dalam mengelola keuangan negara. Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu: 1) Opini BPK, dan 2) Tindak Lanjut Rekomendasi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
		a.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5,00	WTP-WDP-TW-TMP	Mengukur tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
		b.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0-100	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
						Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)				22,00		
		1.	Indeks BerAKHLAK	4,00	0-100	Mengukur tingkat kematangan implementasi <i>core value</i> ASN BerAKHLAK. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
		2.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10,00	0-100	Mengukur tingkat integritas organisasi pada Pemda. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan K/L dalam memetakan risiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Pemberantasan Korupsi).
		3.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN				100,00		

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Penjelasan
	KOEFISIEN			Koefisien adalah penambahan atau pengurangan atas hasil RB General yang berdasarkan pada beberapa variabel.
	TOTAL RB GENERAL			
RB Tematik		20,00		
	A. Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5,00		
	1. Pengentasan Kemiskinan	1,00	0-100	Evaluasi RB Tematik dilakukan kepada Pemerintah Provinsi dengan mengukur upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi, serta capaian indikator dampak RB Tematik.
	2. Realisasi Investasi	1,00	0-100	
	3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting	1,00	0-100	
	4. Prioritas Aktual Presiden			
	a. Penggunaan Produk Dalam Negeri	1,00	0-100	
	b. Laju Inflasi	1,00	0-100	
	B. Capaian Indikator Dampak RB Tematik	15,00		

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Penjelasan	
	1.	Penurunan Tingkat Kemiskinan	3,00	0-100	Mengukur capaian dampak dari pembangunan RB Tematik yang telah dilakukan pada empat tema yang telah ditetapkan.
	2.	Peningkatan Realisasi Investasi	3,00	0-100	
	3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	3,00	0-100	
	4.	Prioritas Aktual Presiden:			
	a.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	3,00	0-100	
	b.	Tingkat Inflasi	3,00	0-100	
TOTAL RB TEMATIK			20,00		
TOTAL NILAI RB			120,00		

Keterangan:

- Dalam hal instansi pemerintah tidak ditetapkan sebagai lokus evaluasi K/L Meso, maka penilaian RB General tidak mengikutsertakan indikator terkait
- Dalam hal terdapat indikator yang tidak dilakukan evaluasi pada tahun ini, maka nilai indikator yang digunakan adalah nilai tahun terakhir.

c. Lembar Kerja Evaluasi RB Pemerintah Kabupaten/Kota

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
RB General			100,00		
A. Strategi Pelaksanaan RB General			10,00		
	1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	0-100	Menilai kualitas rencana aksi Pembangunan RB General yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda), misalnya legal hukum RB General yang dikeluarkan, bentuk kolaborasi yang dibangun, serta strategi-strategi atas kegiatan utama yang ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional.
	2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	0-100	Menilai kualitas implementasi rencana aksi Pembangunan RB General yang telah disusun dengan menganalisis capaian rencana aksi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional. Nilai Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General dipengaruhi oleh Nilai Kualitas Rencana Aksi Pembangunan RB General.

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Penjelasan	
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40,00			
	HARD ELEMENT (Sasaran 1)	32,00			
	KEBIJAKAN PERCEPATAN	32,00			
	1.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3,00	0-5	Mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	2.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	1-5	Mengukur kualitas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
	3.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)	3,50	0-3,5	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM secara rata-rata tiga tahun terakhir pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
					(Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	4.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	4,00	0-100	Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	5.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	0-5	Mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	6.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,50	0-100	Mengukur kualitas implementasi penyelenggaraan kearsipan pada Pemda dalam rangka transformasi digital

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
					kearsipan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Arsip Nasional Republik Indonesia).
	7.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,50	1-5	Mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR! sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
	8.	Indeks Kualitas Kebijakan	2,50	0-100	Mengukur kualitas kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pemda pada proses perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Administrasi Negara).
	9.	Indeks Reformasi Hukum	2,50	0-100	Mengukur reformasi hukum pada Pemda dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi nasional. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Penilaian		Bobot	Range Nilai	Penjelasan	
	10.	Indeks Pembangunan Statistik	2,50	1-5	Mengukur kualitas kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pusat Statistik).
	11.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,50	0-100	Mengukur kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)			800		
KEBIJAKAN PERCEPATAN			8,00		
	1.	Indeks Sistem Merit	4,00	0-410	Mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Aparatur Sipil Negara).
	2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	4,00		Mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman RI).
	a.	Indeks Pelayanan Publik	2,00	0-5	

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
		b.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2,00	0-100	
C. Capaian Sasaran Strategis RB				50,00		
HARD ELEMENT (Sasaran 1)				28,00		
		1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9,00	1-5	Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan Pemda dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
		2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00		Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas K/L dalam mengelola kinerja. Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu: 1) Capaian IKU Makro, dan 2) Capaian IKU Non Makro

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
		a.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Makro	4,00	0-100	Menghitung capaian IKU Makro dengan membandingkan realisasi indikator makro dengan rata rata realisasi dalam satu provinsi yang sama.
		b.	Capaian IKU Non Makro	6,00	0-100	Menghitung capaian IKU Non Makro dengan membandingkan antara jumlah IKU Non Makro yang telah mencapai >90% dengan jumlah IKU Non Makro pemerintah provinsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Nasional. Capaian IKU Non Makro dipengaruhi oleh Nilai SAKIP.
	3.		Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00		Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas Pemda dalam mengelola keuangan negara. Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu: 1) Opini BPK, dan 2) Tindak Lanjut Rekomendasi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
		a.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5,00	WTP-WDP-TW-TMP	Mengukur tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
		b.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0-100	Mengukur tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Badan Pemeriksa Keuangan).
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)				22,00		
		1.	Indeks BerAKHLAK	4,00	0-100	Mengukur tingkat kematangan implementasi <i>core value</i> ASN BerAKHLAK. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
		2.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10,00	0-100	Mengukur tingkat integritas organisasi pada Pemda. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan K/L dalam memetakan risiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Pemberantasan Korupsi).
		3.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari Pemda. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian

Penilaian			Bobot	Range Nilai	Penjelasan
					Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN			100,00		
KOEFISIEN					Koefisien adalah penambahan atau pengurangan atas hasil RB General yang berdasarkan pada beberapa variabel.
TOTAL RB GENERAL					
RB Tematik			20,00		
A. Strategi Pelaksanaan RB Tematik			5,00		
	1.	Pengentasan Kemiskinan	1,00		Evaluasi RB Tematik dilakukan kepada Pemerintah Provinsi dengan mengukur upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi, serta capaian indikator dampak RB Tematik.
	2.	Realisasi Investasi	1,00	0-100	
	3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	1,00	0-100	
	4.	Prioritas Aktual Presiden			

Penilaian				Bobot	Range Nilai	Penjelasan
		a.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	1,00	0-100	
		b.	Pengendalian Inflasi	1,00	0-100	
B. Capaian Indikator Dampak RB Tematik				15,00		
	1.	Penurunan Tingkat Kemiskinan		3,00	0-100	Mengukur capaian dampak dari pembangunan RB Tematik yang telah dilakukan pada empat tema yang telah ditetapkan.
	2.	Peningkatan Realisasi Investasi		3,00	0-100	
	3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting		3,00	0-100	
	4.	Prioritas Aktual Presiden:				
		a.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	3,00	0-100	
		b.	Tingkat Inflasi	3,00	0-100	
TOTAL RB TEMATIK				20,00		
TOTAL NILAI RB				120,00		

Keterangan:

- Dalam hal instansi pemerintah tidak ditetapkan sebagai lokus evaluasi K/L Meso, maka penilaian RB General tidak mengikutsertakan indikator terkait

- Dalam hal terdapat indikator yang tidak dilakukan evaluasi pada tahun ini, maka nilai indikator yang digunakan adalah nilai tahun terakhir.

II. Kriteria Penilaian Rencana Aksi RB General

Kriteria		Penjelasan
A.	Penilaian Kegiatan Utama <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	
1.	Penetapan Kegiatan Utama	Seluruh kegiatan utama yang diamanatkan dalam <i>Road Map</i> RB Nasional telah ditetapkan pada <i>Road Map</i> RB kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
2.	Penetapan Target Indikator Kegiatan Utama	Seluruh indikator kegiatan utama yang ditetapkan telah dikawal dengan target yang logis, realistis, dan berorientasi peningkatan kinerja.
3.	Keabsahan Rencana Aksi	Telah terdapat pernyataan keabsahan atas rencana aksi yang ditetapkan.
B.	Kriteria Penilaian Penetapan Rencana Aksi	
1.	Kelogisan Rencana Aksi	Penetapan rencana aksi memperhatikan kelogisan aksi dengan kebutuhan. Penetapan rencana aksi juga telah melalui proses analisis, termasuk memperhatikan kondisi <i>baseline</i> /eksisting yang direpresentasikan melalui indikator <i>immediate outcome</i> .
2.	Relevansi dan Kecukupan Indikator <i>Output</i>	Penetapan indikator <i>output</i> pada setiap aksi perlu memenuhi kriteria relevansi dan cukup dalam menjawab aksi yang ditetapkan.
3.	Ketepatan Penetapan Target Indikator <i>Output</i>	Ketepatan penetapan target pada setiap indikator <i>output</i> mencakup aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target yang ditetapkan untuk

		mengukur hasil atau capaian dari suatu aksi.
4.	Anggaran	Ketersediaan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan aksi yang telah ditetapkan.

III. Definisi Operasional Indikator Keberhasilan Evaluasi RB Tahun 2024

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
1	Indeks BerAKHLAK	Kementerian PANRB c.q. SDMA	Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi <i>core values</i> ASN BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.	0 - 100% (A - D)	75% - 100% (A) = Sehat 50% - 74,9% (B) = Cukup Sehat 25% - 49,9% (C) = Tidak Sehat 0 - 24,9% (D) = Sangat Tidak Sehat	Nilai Indeks BerAKHLAK B

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
2	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Badan Pusat Statistik	Indeks Pembangunan Statistik adalah ukuran yang menggambarkan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Indeks Pembangunan Statistik dihitung melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral Instansi Pemerintah pada setiap domain, aspek, dan indikator.	1 - 5	4,2 s.d. 5,0 = Memuaskan 3,5 s.d. < 4,2 = Sangat Baik 2,6 s.d. < 3,5 = Baik 1,8 s.d. < 2,6 = Cukup < 1,8 = Kurang	Nilai IPS 2,6 s.d. < 3,5

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (Kementerian/ Lembaga)	Kementerian PANRB c.q. Balaks	Persentase PSO merupakan perbandingan antara jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan. Penghitungan persentase PSO dilakukan pada unit organik, instansi vertikal, dan/atau unit pelaksana teknis baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi daerah.	0 - 100%	-	Nilai di atas 80%

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Kementerian PANRB c.q. Balaks	Penyesuaian sistem kerja dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian tingkat penerapan sistem kerja dilakukan pada Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan PSO.	0 - 5	<p>0 = tidak melakukan PSO</p> <p>1 = telah terdapat dokumen yang menyatakan akan dilakukan penyusunan draf sistem kerja</p> <p>2 = sedang dalam penyusunan draf pengaturan sistem kerja</p> <p>3 = telah menetapkan sistem kerja</p> <p>4 = telah menetapkan sistem kerja dan menerapkan <i>squad team</i></p> <p>5 = telah menetapkan sistem, menerapkan <i>squad team</i>, serta melakukan</p>	Nilai di atas 4

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
					perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP	
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi Sistem Pengadaan, yaitu sebagai berikut: 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari: a. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan); b. <i>E-Tendering</i> (Tender/Seleksi/Tender Cepat); c. <i>E-Purchasing</i> ; d. <i>Non-E-Tendering</i> & <i>Non-E-</i>	0 - 100	100 = Istimewa > 90 s.d. < 100 = Sangat Baik > 70 s.d. 90 = Baik ≥ 50 s.d. 70 = Cukup < 50 = Kurang	Nilai ITKP dengan kategori Baik

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
			<p><i>Purchasing</i>; dan</p> <p>e. E-Kontrak.</p> <p>2. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ).</p> <p>3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).</p>			
6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Kementerian Keuangan	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.	0 - 100	<p>IKPA \geq 95 = Sangat Baik</p> <p>89 \leq IKPA < 95 = Baik</p> <p>70 \leq IKPA < 89 = Cukup</p> <p>IKPA < 70 = Kurang</p>	89 \leq IKPA < 95

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
7	Tingkat Maturitas SPIP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Level 1 (skor 1,00) - Level 5 (skor \geq 4,50)	Level 1 = Rintisan (skor 1,00 - 1,99) Level 2 = Berkembang (skor 2,00 - 2,99) Level 3 = Terdefinisi (skor 3,00 - 3,99) Level 4 = Terkelola dan Terukur (skor 4,00 - 4,49) Level 5 = Optimum (skor 4,50 dst.)	Level 3 / Terdefinisi
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	Kementerian PPN / Bappenas	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi. Komponen utama dari penilaian IPPN ini dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh K/L/D	0 - 100	91 - 100 = Sangat Baik 81 - 90 = Baik 71 - 80 = Cukup Baik 61 - 70 = Kurang < 60 = Sangat Kurang	> 81 dan < 91

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
			<p>sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Metode pengukuran IPPN dilakukan dengan menilai hasil dari dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun oleh K/L/D dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun pengukuran.</p> <p>Dikarenakan karakteristik dan mekanisme penyusunannya yang berbeda, maka untuk penilaian terhadap IPPN K/L/D dilakukan dengan menggunakan parameter yang berbeda.</p>			

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Kementerian PANRB c.q. Balaks dan Kementerian/Lembaga teknis terkait	adalah tingkat kematangan penerapan dan pelaksanaan tindakan-tindakan konkret yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan arsitektur SPBE. Tingkat ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh seluruh pihak yang terlibat di instansi untuk menerapkan aspek-aspek penting dalam kebijakan arsitektur SPBE, antara lain aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi proyek TIK.	0 - 5	(0) Belum memiliki arsitektur (1) sudah memiliki arsitektur <i>as-is</i> (2) memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur <i>to-be</i> (3) memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan <i>gap analysis</i> serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (<i>as-is</i> , <i>to-be</i> , dan <i>gap analysis</i> -nya) (4) memenuhi kriteria (3) dan telah	Telah memiliki arsitektur <i>as-is</i> , <i>to-be</i> , dan peta rencana SPBE (Nilai tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE = 3)

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
					<p>mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK)</p> <p>(5) memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan reviu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan</p>	

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
12	Tingkat Digitalisasi Arsip	Arsip Nasional RI	<p>Instrumen untuk menilai kualitas Kinerja penyelenggaraan kearsipan K/L/D dalam rangka transformasi digital kearsipan (digitalisasi arsip) yang meliputi ketersediaan kebijakan dan kinerja pengelolaan arsip elektronik/digital yang terdiri dari;</p> <ol style="list-style-type: none"> Digitasi Implementasi AUBKD/SRIKANDI atau aplikasi sejenis Kinerja Simpul JIKN/SIKN Ketersediaan sumber daya (Audit TIK, SDM, data center dan <i>helpdesk</i>) 	0 - 100	<p>0 - 40 = Sangat Kurang > 40 - 50 = Kurang > 50 - 60 = Cukup > 60 - 70 = Baik > 70 - 80 = Sangat Baik > 80 - 90 = Memuaskan > 90 - 100 = Sangat Memuaskan</p>	<p>> 60 - 70 = Tersedianya kebijakan dalam rangka mendukung pengelolaan arsip secara elektronik dan menerapkan aplikasi bidang kearsipan sampai dengan pemberkasan arsip secara elektronik dan layanan arsip digital melalui JIKN.</p>

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
13	Indeks Pengelolaan Aset	Kementerian Keuangan	<p>Indikator Kinerja Pengelolaan BMN atau Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan parameter pengukuran kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang secara tahunan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN).</p> <p>Indikator Kinerja Pengelolaan BMN atau IPA disusun untuk mengukur kinerja pengelolaan BMN yang tercakup dalam siklus pengelolaan BMN mewujudkan 4 (empat) sasaran strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan; 	1 - 4	<p>Indeks 4 = Sangat Baik Indeks 3 = Baik Indeks 2 = Cukup Indeks 1 = Buruk</p>	Indeks 3

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
			<p>3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan</p> <p>4. Administrasi BMN yang andal.</p>			
14	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Kementerian PANRB c.q. Yanlik	<p>Kualitas pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dapat diukur melalui indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDM Pengelola (dibuktikan melalui SK Tim Pengelola) - Rencana aksi pengelolaan pengaduan - Tindak lanjut penyelesaian pengaduan - Responsivitas penyelesaian pengaduan (Kecepatan tindak lanjut) - Kualitas penyelesaian pengaduan - Rating penilaian masyarakat 	1 - 5	<p>5 (Sangat Baik) =</p> <p>(1) Memiliki SK Pengelola,</p> <p>(2) Memiliki Rencana aksi,</p> <p>(3) 90% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang diterima >100 laporan,</p> <p>(4) kecepatan tindak lanjut < 3 hari</p> <p>(5) pengaduan ditindaklanjuti secara substantif</p> <p>(6) rata-rata rating</p>	Mendapatkan nilai minimal 4

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
					<p>penilaian masyarakat >4</p> <p>4 (Baik) = Hanya memenuhi 4 dari 6 indikator untuk mendapatkan nilai tertinggi</p> <p>3 (Cukup) = Hanya memenuhi 3 dari 6 indikator untuk mendapatkan nilai tertinggi</p> <p>2 (Kurang Baik) = Hanya memenuhi 2 dari 6 indikator untuk mendapatkan nilai tertinggi</p> <p>1 (Sangat Tidak Baik) = Hanya memenuhi</p>	

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
					maksimal 1 dari 6 indikator untuk mendapatkan nilai tertinggi	
15	Indeks Kualitas Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara	<p>Indeks Kualitas Kebijakan yang selanjutnya disingkat IKK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan pada proses perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan.</p> <p>Pengukuran IKK pada proses perencanaan kebijakan dilakukan pada tahap:</p> <p>a. agenda setting kebijakan; dan</p> <p>b. formulasi kebijakan.</p> <p>Pengukuran IKK pada proses evaluasi kemanfaatan dilakukan pada tahap:</p>	0 - 100	91 - 100 = Unggul 80 - 90,99 = Sangat Baik 65 - 79,99 = Baik 50 - 64,99 = Cukup < 50 = Kurang	65 - 79,99 (Baik)

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
			a. implementasi kebijakan; dan b. evaluasi kebijakan.			
16	Indeks Reformasi Hukum	Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi nasional.	0 - 100	> 90 - 100 (AA / Istimewa) > 80 - 90 (A / Sangat Baik) > 70 - 80 (BB / Baik) > 60 - 70 (B / Cukup Baik) > 50 - 60 (CC / Cukup) > 30 - 50 (C / Buruk) 0 - 30 (D / Sangat Buruk)	> 70 - 80 (BB)

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
17	Indeks Sistem Merit	Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang SDM Aparatur, Komisi Aparatur Sipil Negara	Indikator yang menggambarkan tingkat penerapan sistem merit pada instansi pemerintah (K/L/D) dengan penilaian yang didasarkan aspek: 1. Perencanaan kebutuhan; 2. Pengadaan; 3. Pengembangan karier; 4. Promosi, dan mutasi; 5. Manajemen kinerja; 6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin; 7. Perlindungan dan pelayanan; 8. Sistem informasi.	Skor: 0 - 410 Indeks: 0 - 1	Buruk Skor: 0 - 174 Indeks: 0 - 0,4 Kurang Skor: 175 - 249 Indeks: 0,41 - 0,6 Baik Skor: 250 - 324 Indeks: 0,61 - 0,8 Sangat Baik Skor: 325 - 410 Indeks: 0,81 - 1	Jika Instansi Pemerintah telah memenuhi skor komposit aspek penerapan sistem merit \geq 250
18	Indeks Pelayanan Publik	Kementerian PANRB c.q. Yanlik	IPP adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja	0 - 5	4,51 - 5,00 (A) = Pelayanan Prima 4,01 - 4,50 (A-) = Sangat Baik	\geq 3,51

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
			<p>penyelenggaraan pelayanan publik secara nasional.</p> <p>Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pelayanan (24%) 2. Profesionalisme SDM (25%) 3. Sarana Prasarana (18%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%) 5. Konsultasi Pengaduan (11%) 6. Inovasi (12%) <p>Adapun penilaian dilakukan melalui 3 formulir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulir 01 : Pengisian Bukti dukung (Bobot 0%) - Formulir 02: Penilaian Ahli (Bobot 75%) - Formulir 03: Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan (Bobot 25%) 		<p>3,51 - 4,00 (B) = Baik</p> <p>3,01 - 3,50 (B-) = Baik dengan Catatan</p> <p>2,51 - 3,00 (C) = Cukup</p> <p>2,01 - 2,50 (C-) = Cukup dengan Catatan</p> <p>1,51 - 2,00 (D) = Prioritas Pembinaan</p> <p>1,01 - 1,50 (E) = Prioritas Pembinaan</p> <p>0 - 1,00 (F) = Prioritas Pembinaan</p>	

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
19	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Ombudsman RI	<p>Penilaian Pelayanan kepatuhan pelayanan publik dalam memenuhi standar pelayanan publik demi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Variabel yang menjadi komponen penilaian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Pelaksana 2. Sarana Prasarana 3. Standar Pelayanan 4. Persepsi Maladministrasi 5. Pengelolaan Pengaduan Kepatuhan Standar Publik mengukur penyelenggara 	0 - 100	<p>88,00 - 100 (A) = Zona Hijau Kualitas Tertinggi 78,00 - 87,99 (B) = Zona Hijau Kualitas Tinggi 54,00 - 77,99 (C) = Zona Kuning Kualitas Sedang 32,00 - 53,99 (D) = Zona Merah Kualitas Rendah 0 - 31,99 (E) = Zona Merah Kualitas Terendah</p>	78,00 - 87,99 Kategori B Zona Hijau Kualitas Tinggi

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
20	Indeks SPBE	Kementerian PANRB c.q. Balaks	<p>- Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat)</p> <p>Domain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Kebijakan Internal 2. Domain Tata Kelola SPBE 3. Domain Manajemen SPBE 4. Domain Layanan SPBE <p>Ruang lingkup Indikator Evaluasi SPBE:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Domain Kebijakan SPBE, terdiri dari 1 (satu) Aspek, yaitu Penguatan Kebijakan SPBE Internal yang memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator. b) Domain Tata Kelola SPBE, terdiri dari 3 (tiga) Aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Perencanaan Strategis, memiliki turunan 4 (empat) Indikator; 2. Aspek TIK, memiliki turunan 4 (empat) Indikator; 	1 - 5	<p>Ukuran Tingkat Kematangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tingkat 1 (satu) mendapatkan predikat kurang dengan rentang nilai < 1,8 b) Tingkat 2 (dua) mendapatkan predikat cukup dengan rentang nilai 1,8 - <2,6 c) Tingkat 3 (tiga) diberi predikat baik dengan rentang penilaian 2,6 - 3,5 d) Tingkat 4 (empat) diberi predikat sangat baik dengan rentang penilaian 3,5 - < 4,2 e) Tingkat 5 (lima) diberi predikat memuaskan 	<p>Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a). 4,2 – 5,0 Memuaskan b). 3,5 – < 4,2 Sangat Baik c). 2,6 – < 3,5 Baik d). 1,8 – < 2,6 Cukup e). < 1,8 Kurang

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
			<p>3. Aspek Penyelenggara SPBE, memiliki turunan 2 (dua) Indikator.</p> <p>c) Domain Manajemen SPBE, terdiri dari 2 (dua) Aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Penerapan Manajemen, memiliki turunan 8 (delapan) Indikator; 2. Aspek TIK, memiliki turunan 3 (tiga) Indikator. <p>d) Domain Layanan SPBE, terdiri dari 1 Aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator; 2. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, memiliki turunan 6 (enam) Indikator. 		<p>dengan rentang penilaian 4,2 - 5,0</p> <p>Penghitungan Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE</p> <p>Nilai indeks:</p> <p>a) Nilai Indeks Aspek, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek</p>	

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
					<p>tersebut.</p> <p>b) Nilai Indeks Domain, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut.</p> <p>c) Nilai Indeks SPBE, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE</p>	

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
					<p>secara keseluruhan, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.</p> <p>Bobot Domain: Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE : 13,00% Domain 2 - Tata Kelola SPBE : 25,00% Domain 3 - Manajemen SPBE : 16,50% Domain 4 - Layanan SPBE : 45,50% Total Bobot : 100,00%</p>	

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
21	Capaian Akuntabilitas Keuangan: Opini BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	<p>Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.</p> <p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosure</i>) 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 4. efektivitas sistem pengendalian intern 		<p>Opini BPK:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) - Wajar Dengan Pengecualian (WDP) - Tidak Wajar (TW) - Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) 	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
22	Capaian Akuntabilitas Keuangan: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dilakukan dengan pemantauan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Tindak lanjut tersebut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung dan wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK: - tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi - tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi - rekomendasi belum ditindaklanjuti - rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti	tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti untuk LHP yang terbit pada Periode RPJMN tahun 2020-2023 (minimal penyelesaian 75%)

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
23	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Komisi Pemberantasan Korupsi	Komponen Penilaian: 1. Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas 2. Integritas Instansi 3. Pengelolaan Anggaran 4. Pengelolaan PBJ 5. Pengelolaan SDM 6. Perdagangan Pengaruh (<i>Trading in Influence</i>) 7. Sosialisasi Antikorupsi 8. Transparansi 9. Upaya Pencegahan Korupsi 10. Transparansi dan Keadilan Layanan 11. Integritas Pegawai	0 - 100	Merah < 72.9 Kuning 73 - 77.9 Hijau 78 - 100	Hijau

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
24	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kementerian PANRB c.q. Yanlik	Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	Nilai Interval 1 - 4 (Nilai Interval Konversi 0 - 100)	1.00 – 2.5996 (25.00 – 64.99) = D, Tidak Baik 2.60 – 3.064 (65.00 – 76.60) = C, Kurang Baik 3.0644 – 3.532 (76.61 – 88.30) = B, Baik 3.5324 – 4.00 (88.31 – 100.00) = A, Sangat Baik	Nilai SKM B
25	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Kementerian PANRB c.q. Deputi RBKunwas	Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas dalam rata-rata tiga tahun terakhir. Baik unit kerja predikat WBK maupun WBBM	Kementerian /Lembaga (0 - 3) Pemerintah Daerah (0 - 3,5)	Kementerian/Lembaga: (>75%) = 3 (>40%-75%) = 2 (>10%-40%) = 1 (0,1%-10%) = 0,75 0% = 0,5 Tidak Mengusulkan = 0 Pemerintah Daerah: (>75%) = 3,5 (>40%-75%) = 2,5	Kementerian/Lembaga: 2 Pemerintah Daerah: 2,5

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
					(>10%-40%) = 1,5 (0,1%-10%) = 0,75 0% = 0,5 Tidak Mengusulkan = 0	
26	Nilai SAKIP	Kementerian PANRB c.q. RBKUNWAS	Komponen evaluasi AKIP terdiri dari: a. perencanaan kinerja (30%) b. pengukuran kinerja (30%) c. pelaporan kinerja (15%) d. evaluasi AKIP internal (25%)	0 - 100	> 90 - 100 (AA) = Sangat Memuaskan > 80 - 90 (A) = Memuaskan > 70 - 80 (BB) = Sangat Baik > 60 - 70 (B) = Baik > 50 - 60 (CC) = Cukup (Memadai) > 30 - 50 (C) = Kurang 0 - 30 (D) = Sangat Kurang	> 60 - 70

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
27	Capaian Akuntabilitas Kinerja: Capaian Prioritas Nasional	Kementerian PPN/Bappenas	Capaian Prioritas Nasional diukur menggunakan kinerja efektivitas <i>output</i> kementerian/lembaga dengan membandingkan capaian dan target RO kementerian/lembaga yang mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Rata-rata kinerja secara keseluruhan dihitung dengan metode rata-rata tertimbang (pagu anggaran sebagai bobot).	0 - 100%	<ul style="list-style-type: none"> ● > 90% = Baik ● 60% - 90% = Cukup ● < 60% = Kurang 	> 90 %
28	Capaian Akuntabilitas Kinerja: Capaian IKU Kementerian/ Lembaga		Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) bersumber dari indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) K/L dengan membandingkan jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU yang dilaporkan dalam laporan kinerja.	0-100%		

No.	Indikator	Pengampu	Definisi Operasional	Rentang Penilaian	Kategori Penilaian	Definisi Target "Baik"
29	Capaian Akuntabilitas Kinerja: Capaian IKU Makro		<p>Capaian IKU Makro diukur dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi, dengan membandingkan realisasi indikator makro dengan target nasional; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan membandingkan realisasi indikator makro dengan rata rata realisasi dalam satu provinsi yang sama. 	0-100%		
30	Capaian Akuntabilitas Kinerja: Capaian IKU Non Makro		Capaian IKU Non Makro diukur dengan membandingkan jumlah IKU Non Makro yang capaiannya >90% dengan total IKU yang dilaporkan dalam laporan kinerja.	0-100%		

IV. Kriteria Penilaian RB Tematik

1. Kementerian/Lembaga

Penilaian RB Tematik pada kementerian/lembaga dilakukan dengan mengukur upaya inisiatif atau terobosan yang termuat dalam rencana aksi tema terkait, capaian atas rencana aksi, serta capaian indikator dampak RB Tematik. Adapun kriteria penilaian RB Tematik pada kementerian/Lembaga dapat dilihat pada tabel berikut.

Filter	Kriteria	Penjelasan
A. Strategi Pembangunan RB Tematik		
I. Rencana Aksi		
Input Rencana Aksi RB Tematik pada Portal RB Nasional serta Keabsahan dari Rencana Aksi	a. Kualitas Sasaran Keberhasilan RB	
	Kesesuaian Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Dapat diklaim apabila sasaran telah berorientasi hasil/ <i>outcome</i> .
	Kesesuaian Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	<i>Implementing agency</i> : dapat diklaim apabila indikator keberhasilan RB Tematik telah sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat khusus dalam tematik, serta secara logis dapat mendukung tercapainya dampak tematik. <i>Enabling agency</i> dan <i>supporting agency</i> : dapat diklaim apabila indikator keberhasilan RB Tematik telah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.
	Perumusan indikator telah memenuhi kriteria SMART	Dapat diklaim apabila indikator yang dirumuskan telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur

Filter		Kriteria	Penjelasan
		dan Cukup	keberhasilan sasaran RB Tematik.
		b. Kualitas Rencana Aksi	
		Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Dapat diklaim apabila rencana aksi yang disusun secara logis dapat mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi pemerintah.
		Kualitas strategi/upaya yang terdapat dalam Rencana Aksi	Dapat diklaim apabila rencana aksi telah memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
		Rencana Aksi memuat kolaborasi nyata	Dapat diklaim apabila rencana aksi memuat bentuk kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau <i>stakeholder</i> eksternal di luar pemerintahan.
II. Capaian Output			
	Input Capaian Rencana Aksi pada Portal Reformasi Birokrasi	Capaian Rencana Aksi	Rata-rata capaian seluruh rencana aksi dengan mempertimbangkan kualitas rencana aksi.

	Filter	Kriteria	Penjelasan
B.	Capaian Dampak		
	Memilih tema, input sasaran dan indikator, input rencana aksi, dan input capaian rencana aksi pada Portal RB	Capaian Dampak RB Tematik	<p>Capaian dampak RB Tematik pada tema yang dipilih dihitung berdasarkan capaian nasional serta mempertimbangkan kualitas strategi pembangunan.</p> <p>a. Pembobotan pada tema Pengentasan Kemiskinan/Realisasi Investasi/Digitalisasi Administrasi Pemerintahan/Pengendalian Inflasi dilakukan dengan memperhitungkan persentase capaian nasional sebagai berikut:</p> <p><i>Implementing Agency:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● > 100% = 1,2 ● 90% - 100% = 1 ● 80% - 90% = 0,5 ● < 80% = 0 <p><i>Enabling Agency:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● > 100% = 1 ● 90% - 100% = 0,5 ● 80% - 90% = 0,25 ● < 80% = 0 <p><i>Supporting Agency:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● > 100% = 0,80 ● 90% - 100% = 0,40 ● 80% - 90% = 0,20 ● < 80% = 0 <p>b. Pembobotan pada tema Penggunaan Produk Dalam</p>

Filter	Kriteria	Penjelasan
		<p>Negeri didasarkan pada capaian penggunaan Produk Dalam Negeri dengan mempertimbangkan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan.</p> <p><i>Implementing Agency:</i> Perhitungan Capaian Tematik PDN dilihat dari dua aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Capaian PDN Nasional b. Capaian PDN Instansional <p><i>Supporting Agency:</i> Perhitungan Capaian Tematik PDN dilihat dari Capaian PDN Instansional.</p>

2. Pemerintah Daerah

Indikator penilaian capaian RB Tematik pada pemerintah daerah terdiri dari komponen penilaian strategi pelaksanaan RB Tematik serta capaian indikator dampak RB Tematik pemerintah daerah.

2.1 Penilaian Strategi Pelaksanaan RB Tematik Pemerintah Daerah

Filter	Kriteria	Penjelasan
A. Strategi Pelaksanaan RB Tematik		
I. Rencana Aksi		
Input Rencana Aksi RB Tematik pada Portal RB Nasional Serta Keabsahan dari Rencana Aksi	a. Kualitas Sasaran Keberhasilan RB	
	Kesesuaian Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Dapat diklaim apabila sasaran telah berorientasi hasil/ <i>outcome</i> .
	Kesesuaian Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Dapat diklaim apabila indikator keberhasilan RB Tematik telah sesuai dengan <i>Road Map</i> RB Nasional.
	Perumusan indikator telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup	Dapat diklaim apabila indikator yang dirumuskan telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran RB Tematik.
	b. Kualitas Rencana Aksi	
Kesesuaian Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah	Dapat diklaim apabila rencana aksi yang disusun secara logis dapat mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi pemerintah.	

Filter		Kriteria	Penjelasan
		Kualitas strategi/upaya yang terdapat dalam Rencana Aksi	Dapat diklaim apabila rencana aksi telah memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.
		Rencana Aksi memuat kolaborasi nyata	Dapat diklaim apabila rencana aksi memuat bentuk kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan/atau <i>stakeholder</i> eksternal di luar pemerintahan.
II. Capaian Output			
	Input Capaian Rencana Aksi pada Portal RB Nasional	Capaian Rencana Aksi	Rata-rata capaian seluruh rencana aksi dengan mempertimbangkan kualitas rencana aksi.
B. Capaian Dampak			
	Memilih tema, input sasaran dan indikator, input rencana aksi, dan input capaian rencana aksi pada Portal RB Nasional	Capaian Dampak RB Tematik	Skor perhitungan capaian dampak RB Tematik

2.2 Penilaian Capaian Indikator Dampak RB Tematik Pemerintah Daerah

A. Pengentasan Kemiskinan

Perhitungan capaian indikator dampak pada tema pengentasan kemiskinan dilihat berdasarkan tiga aspek penilaian, yaitu:

1. tingkat kemiskinan tahun berjalan;
2. tingkat kemiskinan ekstrem tahun berjalan; dan
3. delta kemiskinan dibandingkan tahun sebelumnya.

Setiap aspek penilaian dibagi ke dalam beberapa kondisi dengan bobot penilaian yang berbeda, sebagaimana diilustrasikan pada tabel di bawah ini. Adapun perhitungan tingkat kemiskinan ekstrem tahun berjalan dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

ASPEK PENILAIAN	BOBOT	KONDISI I	KONDISI II	KONDISI III
Tingkat kemiskinan (Tahun berjalan)	0,5 - 1,5	< 7%	7 - 9%*	> 9%*
		1,5	1	0,5
Tingkat kemiskinan ekstrem (Tahun berjalan)**	0-0,5	< 0,6%	0,6 - 1,2%	> 1,2%
		0,5	0,25	0
Delta Kemiskinan	1-2,5***	Kondisi menurun	Kondisi menurun	Kondisi menurun
		1-2,5 ***		
		Kondisi meningkat	Kondisi meningkat	Kondisi meningkat
		0		

*Rata-rata angka kemiskinan nasional

**Jika tersedia data kemiskinan ekstrem

*** Selisih antara total bobot (3) dengan bobot yang sudah diperoleh dari aspek penilaian tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem

Pengukuran delta kemiskinan dilakukan dengan melihat persentase penurunan kemiskinan pada pemerintah daerah A dibagi persentase penurunan kemiskinan tertinggi pemerintah daerah pada masing-masing kondisi. Lebih jelas ditampilkan pada gambar berikut.

$$\text{Delta Kemiskinan Pemda A} = \frac{(X \text{ Tahun}(n-1) - X \text{ tahun } n) A}{\Delta X_{\text{max}B}} \times (3)$$

Keterangan:

X = Persentase penduduk miskin

ΔX = (X tahun n-1 – X tahun n)

n = Tahun yang diukur

A = Pemerintah daerah yang sedang diukur

B = Kondisi

Max = Nilai tertinggi

Khusus Pemerintah Provinsi, bobot penilaian yang diperoleh akan dikali dengan skor pengali, sesuai dengan kondisi penurunan tingkat kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya.

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENURUN TINGKAT KEMISKINANNYA	KONDISI	SKOR PENGALI
> 90% - 100%	I	100%
75% - 90%	II	75%
< 75%	III	50%

Ilustrasi

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, diketahui Provinsi ABC memiliki tingkat kemiskinan sebesar 6,3% pada tahun 2021 dan 4,0%, serta tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0,42% pada tahun 2022. Diketahui juga bahwa Provinsi ABC mengalami penurunan terbesar

kedua untuk kategori Provinsi pada kondisi I (kemiskinan < 7% yakni penurunan sebesar 2,3%). Penurunan kemiskinan tertinggi pada kondisi I adalah Provinsi JKL dengan persentase penurunannya sebesar 2,5% (dari 6,7% tahun 2021 menjadi 4,2% tahun 2022). Selanjutnya, dari 9 kabupaten/kota pada Provinsi ABC diketahui 7 kabupaten/kota mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Berikut adalah cara pengukuran RB Tematik Kemiskinan Provinsi ABC.

1) (Tingkat Kemiskinan)

Provinsi ABC telah melewati target kemiskinan nasional yakni 7% pada tahun 2024, sehingga Provinsi ABC masuk kedalam Kondisi I dan memperoleh nilai 1,5 poin.

2) (Tingkat Kemiskinan Ekstrem)

Tingkat Kemiskinan Ekstrem pada Provinsi ABC telah berhasil ditekan menjadi 0,42% dan berada di bawah target ideal yaitu 0,6%, sehingga Provinsi ABC masuk ke dalam Kondisi I dan memperoleh nilai 0,5 poin.

3) (Delta Kemiskinan)

Provinsi ABC adalah provinsi dengan persentase penurunan kemiskinan kedua terbesar pada Kondisi I, maka untuk memperoleh nilai delta kemiskinan dilakukan perhitungan dengan membagi persentase penurunan kemiskinan Provinsi ABC dengan persentase penurunan kemiskinan tertinggi pada Kondisi I yakni Provinsi JKL. Sehingga perhitungan nilai delta kemiskinan Provinsi ABC adalah sebagai berikut: $2,3\%/2,5\% \times 1$ poin (sisa bobot tematik), yang menghasilkan delta kemiskinan Provinsi ABC adalah 0,92 poin.

Total nilai RB Tematik Provinsi ABC (sebelum Skor Pengali) sebesar 2,92 (1,5 + 0,5 + 0,92).

4) (Skor Pengali ketentuan khusus Provinsi)

Diketahui bahwa pada Provinsi ABC terdapat 7 dari 9 kabupaten/kota mengalami penurunan kemiskinan atau sekitar 77% (masuk Kondisi II), sehingga skor pengali untuk Provinsi ABC adalah 75%.

Maka, total nilai RB Tematik Pengentasan Kemiskinan Provinsi ABC adalah $2,92 \times 75\% = \mathbf{2,19}$ Poin.

B. Peningkatan Investasi

B.1 Pemerintah Provinsi

Perhitungan capaian dampak realisasi investasi pada tingkat Pemerintah Provinsi dilihat pada dua aspek penilaian, yaitu peningkatan realisasi investasi dan capaian target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

ASPEK PENILAIAN	BOBOT MAKSIMAL
Peningkatan Realisasi Investasi	1,5
Capaian Target	1,5

$$\text{Peningkatan Realisasi Investasi} = \frac{(X \text{ Tahun } (n) - X \text{ tahun } (n-1))}{X \text{ Tahun } (n-1)} \times 1,5$$

Keterangan:

X Tahun (n) = Realisasi Investasi Tahun Berjalan

X Tahun (n-1) = Realisasi Investasi Tahun Lalu

Selanjutnya, bobot penilaian yang diperoleh akan dikali dengan skor pengali, sesuai dengan kondisi peningkatan realisasi investasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya.

Ilustrasi

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENINGKAT REALISASI INVESTASINYA	KONDISI	SKOR PENGALI
> 90% - 100%	I	100%
75% - 90%	II	75%
< 75%	III	50%

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/BKPM didapatkan bahwa realisasi investasi pada Provinsi ABC tahun 2023

sebesar Rp. 850 Miliar sedangkan pada tahun 2022 tingkat realisasi investasi pada Provinsi ABC sebesar Rp. 800 Miliar. Selain itu diperoleh data bahwa capaian atas target realisasi investasi pada Provinsi ABC mencapai 70%. Informasi lain yang didapatkan juga bahwa 92% kabupaten/kota yang berada di bawah Provinsi ABC mengalami kenaikan realisasi investasi. Maka perhitungan skor tematik yang diperoleh Provinsi ABC sebagai berikut:

1) (Peningkatan Realisasi Investasi)

Realisasi investasi pada Provinsi ABC pada tahun 2023 mencapai Rp. 850 Miliar, angka tersebut meningkat dari tahun 2022 yang semula sebesar Rp. 800 Miliar, sehingga perhitungan atas peningkatan realisasi investasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{(850 - 800)}{800} \times 1,5 = 0,09$$

2) (Capaian Target)

Berdasarkan target yang sudah ditetapkan capaian target realisasi investasi pada Provinsi ABC sebesar 70% maka perhitungan untuk aspek penilaian capaian target adalah $70\% \times 1,5 = 1,05$

Sehingga total bobot dari kedua aspek penilaian pada Provinsi ABC didapatkan sebesar 1,14.

3) (Skor Pengali ketentuan khusus Provinsi)

Selanjutnya bobot penilaian tersebut perlu dihitung dengan skor pengali. Berdasarkan informasi, sebesar 92% kabupaten/kota pada Provinsi ABC mengalami peningkatan (masuk Kondisi I), sehingga skor pengali untuk Provinsi ABC didapatkan sebesar 100%.

Sehingga total skor RB Tematik Peningkatan Investasi akhir yang diperoleh Provinsi ABC adalah sebesar **1,14** ($100\% \times 1,14$).

B.2 Pemerintah Kabupaten/Kota

Perhitungan capaian dampak realisasi investasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota dilihat berdasarkan dua aspek penilaian, yaitu realisasi investasi tahun berjalan dan peningkatan realisasi investasi. Perhitungan ini akan diklasifikasikan sesuai dengan kondisi realisasi investasinya pada tahun berjalan. Pengklasifikasian dilakukan dengan membagi ke dalam tiga kluster dengan metode statistika (pembagian kuartil; membagi data menjadi empat bagian yang akan memperoleh tiga nilai kuartil: Q1 = Kategori Tinggi, Q2 = Kategori Sedang, dan Q3 = Kategori Rendah). Sedangkan pada perhitungan aspek peningkatan realisasi investasi, akan dibandingkan dengan peningkatan realisasi investasi secara nasional pada masing-masing kelasnya.

ASPEK PENILAIAN		BOBOT MAKSIMAL (Berdasarkan Realisasi Investasi)		
		Kategori Tinggi	Kategori Sedang	Kategori Rendah
		1.	Realisasi Investasi Tahun Berjalan	2
2.	Peningkatan Realisasi Investasi	1	1,5	2

Rumus Perhitungan Peningkatan Realisasi Investasi =

$$\frac{(X \text{ Tahun } (n)A - X \text{ Tahun } (n-1)A)}{\Delta X_{\max C}} \times \text{Bobot Maksimal Kategori}$$

Keterangan:

X = Nilai realisasi investasi (PMA + PMDN)

$\Delta X = (X \text{ tahun } n-1 - X \text{ tahun } n)$

n = Tahun yang dihitung

A = Pemerintah daerah yang sedang diukur

$\Delta X_{\max C}$ = Peningkatan Realisasi Investasi Terbesar pada masing-masing kluster

Ilustrasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Pemerintah Kabupaten XYZ pada tahun 2023 sebesar Rp. 20 Triliun, sedangkan untuk realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 18 Triliun. Nilai tematik yang akan diperoleh Pemerintah Kabupaten XYZ adalah sebagai berikut.

1) (Realisasi Investasi Tahun Berjalan)

Realisasi investasi 2023 pada Kabupaten XYZ mencapai Rp. 20 Triliun angka tersebut diasumsikan masuk kategori sedang, sehingga Pemerintah Kabupaten XYZ memperoleh skor sebesar 1,5 pada aspek penilaian Realisasi Investasi Tahun Berjalan.

2) (Peningkatan Realisasi Investasi)

Peningkatan realisasi investasi Kabupaten XYZ adalah sebesar Rp. 2 Triliun, jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan asumsi peningkatan realisasi investasi tertinggi secara nasional pada kategori sedang adalah sebesar Rp. 6 Triliun, maka skor penilaian pada aspek peningkatan realisasi investasi pada Kabupaten XYZ adalah sebesar 0,5 ($2/6 \times 1,5$).

Sehingga total skor RB Tematik Peningkatan Investasi yang didapatkan oleh Kabupaten XYZ sebesar **2,00** ($1,5 + 0,5$).

C. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting)

Perhitungan capaian dampak pada tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan yang berfokus pada penurunan stunting memiliki dua aspek penilaian, yaitu tingkat stunting tahun berjalan dan delta tingkat stunting tahun berjalan. Perolehan bobot dari aspek penilaian tersebut juga akan bergantung pada beberapa kondisi prasyarat sebagai skor pengali dari bobot yang diperoleh pada setiap aspek penilaian.

ASPEK PENILAIAN		KONDISI	BOBOT
1.	Tingkat Stunting (Tahun Berjalan)	< 14%	1,5
		> 14%	0,75
2.	Delta Tingkat <i>Stunting</i>	Menurun \geq 3,8%	1,5
		Menurun < 3,8%	< 1,5
		Meningkat	0

Perolehan bobot pada tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dengan fokus penurunan stunting akan bergantung pada beberapa kondisi prasyarat. Kondisi prasyarat tersebut akan menjadi skor pengali dari bobot yang telah diperoleh sebelumnya.

KONDISI PRASYARAT	PENJELASAN	SKOR PENGALI
Kondisi Prasyarat I	1. Rencana Aksi Terkait Digitalisasi 2. Indeks SPBE Minimal Baik (\geq 2,6)	100%
Kondisi Prasyarat II	1. Rencana Aksi Terkait Digitalisasi 2. Indeks SPBE (< 2,6)	75%
Kondisi Prasyarat III	Tidak Ada Rencana Aksi Terkait Digitalisasi	50%

Selanjutnya, khusus bagi Pemerintah Provinsi, bobot penilaian di atas akan dikalikan kembali dengan skor pengali lainnya berdasarkan kondisi penurunan tingkat stunting pada Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya, sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut.

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENGALAMI PENURUNAN TINGKAT STUNTING	KONDISI	SKOR PENGALI
> 90% - 100%	I	100%
75% - 90%	II	75%
< 75%	III	50%

Ilustrasi

(Contoh Kasus Pemerintah Provinsi)

Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan bahwa tingkat stunting pada Provinsi ABC pada tahun 2023 sebesar 16%, dan sebesar 18% pada tahun 2022. Selain itu didapatkan data bahwa pada Provinsi ABC persentase kabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat stunting mencapai 80%. Kondisi Indeks SPBE Provinsi ABC adalah sebesar 2,5 serta rencana aksi tematik yang dibangun sudah terdapat keterkaitan dengan digitalisasi. Diketahui juga bahwa penurunan stunting tertinggi pada Kondisi I (angka stunting > 14%) adalah Pemerintah Daerah XYZ dengan delta sebesar 3,8%. Maka perhitungan skor RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan untuk Provinsi ABC sebagai berikut.

1) (Tingkat Stunting Tahun Berjalan)

Pada Provinsi ABC didapatkan kondisi bahwa tingkat stunting pada tahun berjalan mencapai 16%, yang mana angka tersebut di atas target nasional 14%. Maka skor yang diperoleh untuk aspek penilaian tingkat stunting tahun berjalan sebesar 0,75.

2) (Delta Tingkat Stunting)

Pada tahun 2022 tingkat stunting pada Provinsi ABC mencapai 18% kemudian pada 2023 menurun menjadi 16%. Sehingga untuk delta penurunan tingkat stunting pada Provinsi ABC sebesar 2%, maka skor yang diperoleh untuk aspek delta stunting sebesar $2/3,8 \times 1,5 = 0,78$.

Maka skor penilaian atas kedua aspek penilaian untuk Provinsi ABC adalah $0,75 + 0,78 = 1,53$.

3) (Kondisi Prasyarat)

Selain itu kondisi prasyarat yang diperoleh dari Provinsi ABC adalah Indeks SPBE sebesar 2,5 dan sudah terdapat rencana aksi terkait digitalisasi maka Provinsi ABC memenuhi Kondisi Prasyarat II sehingga skor penilaian setelah penyesuaian kondisi prasyarat sebesar $1,53 \times 75\% = 1,14$.

4) (Skor Pengali Ketentuan Khusus Provinsi)

Selanjutnya, khusus untuk provinsi, terdapat penyesuaian lain yaitu tingkat persentase kabupaten/kota yang tingkat stuntingnya menurun. Berdasarkan data yang diperoleh Provinsi ABC mencapai 80% untuk persentase kabupaten/kota dengan tingkat stunting menurun, sehingga Provinsi ABC berada pada posisi Kondisi 2.

Sehingga skor RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan yang didapatkan oleh Provinsi ABC adalah sebesar $75\% \times 1,14 = 0,855$.

(Contoh Kasus Pemerintah Kabupaten/Kota)

Berdasarkan data yang diperoleh didapatkan bahwa tingkat stunting pada Kabupaten XYZ pada tahun 2023 sebesar 13%, dan sebesar 13,5% pada tahun 2022. Data lain yang diperoleh dari Kabupaten XYZ didapatkan bahwa Indeks SPBE sebesar 3,0 serta rencana aksi tematik yang dibangun sudah terdapat keterkaitan dengan digitalisasi. Maka perhitungan skor tematik untuk Provinsi ABC sebagai berikut.

1) (Tingkat Stunting Tahun Berjalan)

Pada Kabupaten XYZ tingkat stunting tahun berjalan berada pada posisi 13%, kondisi tersebut berada dibawah target nasional yaitu 14%. Maka skor penilaian untuk aspek tingkat stunting tahun berjalan sebesar 1,5.

2) (Delta Tingkat Stunting)

Dari data yang diperoleh, Kabupaten XYZ mengalami penurunan tingkat stunting sebesar 0,5%, yang semula 13,5% pada 2022

menjadi 13% pada 2023. Maka skor penilaian untuk aspek delta stunting sebesar $0,5/3,8 \times 1,5 = 0,19$.

Maka bobot penilaian atas kedua aspek penilaian untuk provinsi ABC sebesar $1,5 + 0,19 = 1,69$.

3) (Kondisi Prasyarat)

Selain itu kondisi prasyarat yang diperoleh dari Kabupaten XYZ adalah Indeks SPBE sebesar 3 dan sudah terdapat rencana aksi terkait digitalisasi maka Kabupaten XYZ memenuhi Kondisi Prasyarat II.

Sehingga skor RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Kabupaten XYZ setelah penyesuaian Kondisi Prasyarat adalah $1,69 \times 75\% = \mathbf{1,26}$.

D. Pengendalian Inflasi

Untuk perhitungan RB Tematik dengan tema Pengendalian Inflasi, akan menggunakan data ranking inflasi yang merupakan komponen penilaian dalam Indeks Kinerja Pengendalian Inflasi Pangan Daerah (IKPIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun ranking inflasi adalah Indeks Harga Konsumsi (IHK) dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang telah dinormalisasi terhadap data pangan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang telah diolah oleh BPS. Berikut bobot dan cara pengukuran RB Tematik Pengendalian Inflasi untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Aspek Penilaian	Bobot Maksimal
Ranking Inflasi	3
Cara Pengukuran	
$\text{Nilai RB Tematik Inflasi} = \frac{\text{Ranking Inflasi IKPIP D}}{50 * } \times 3$	

*)Bobot ranking inflasi dalam IKPIP D

Ilustrasi

Berdasarkan data IKPIP D oleh Kemendagri, diperoleh ranking inflasi Kabupaten XYZ adalah 38, maka nilai RB Tematik inflasinya adalah $38/50 \times 3$ (bobot tematik) = **2,28** poin.

Selanjutnya, khusus bagi Pemerintah Provinsi, bobot penilaian di atas akan dikalikan kembali dengan skor pengali lainnya berdasarkan **kondisi IKPIP D** pada pemerintah kabupaten/kota di bawahnya, sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut.

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG IKPIP D MINIMAL PADA PERSEPSI “SESUAI ATAU ≥ 65 NILAI IKPIP D”	KONDISI	SKOR PENGALI
> 90% - 100%	I	100%
75% - 90%	II	75%
< 75%	III	50%

Ilustrasi

Berdasarkan data IKPIP D oleh Kemendagri, diperoleh ranking inflasi Pemerintah Provinsi ABC adalah 42 dan dari total 38 kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan diketahui 26 kabupaten/kota (68,42%) memiliki nilai IKPIP D minimal pada persepsi “sesuai” (≥ 65) atau dengan kata lain skor pengali untuk Provinsi ABC adalah 50% (Kondisi III, Rentang < 75%). Dengan demikian, nilai RB Tematik Pengendalian Inflasi Provinsi ABC adalah $42/50 \times 3$ (bobot tematik) = 2,52 poin x skor pengali (50%) = **1,26** poin.

E. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam perhitungan capaian dampak RB Tematik penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada dasarnya akan melihat realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun berjalan yang datanya bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Namun sebelum masuk pada perhitungan realisasi tersebut, pemerintah daerah perlu memenuhi kondisi awal untuk memperoleh bobot penilaian sebagaimana pada tabel berikut.

FILTER	TARGET
(% Rencana PDN)	Minimal 40%

Selanjutnya, capaian dampak RB Tematik PDN pada Pemerintah Daerah akan diukur dengan melihat persentase realisasi PDN, yang membandingkan antara realisasi pengadaan yang merupakan PDN dengan Realisasi keseluruhan melalui penyedia kemudian akan dikali dengan bobot tematik. Untuk mendorong aspek keadilan, pengukuran dilakukan dengan memberikan perbedaan pembobotan memperhatikan kontribusi terhadap penggunaan PDN, hal ini dilihat dari besaran realisasi penyedia Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

ASPEK PENILAIAN	KONDISI I	KONDISI II
Realisasi Penyedia	≥ Rp. 500 Miliar	< Rp. 500 Miliar
	2	1
Persentase Realisasi PDN	1	2

Selanjutnya bobot penilaian yang didapatkan akan dikalikan dengan skor pengali, sesuai dengan kondisi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKPBJ) pada instansi pemerintah serta tingkat capaian target PDN, sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut.

PENJELASAN Skor ITKP	CAPAIAN TARGET PDN	SKOR	NILAI
		PENGALI	MAKSIMAL
1. ITKP Baik	> 90% - 100%	100%	3
	75% - 90%	75%	2,25
	< 75%	50%	1,5
2. ITKP Cukup	> 90% - 100%	75%	2,25
	75% - 90%	50%	1,5
	< 75%	25%	0,75
3. ITKP Kurang	> 90% - 100%	50%	1,5
	75% - 90%	25%	0,75
	< 75%	0	0

Ilustrasi

Berdasarkan data Capaian PDN oleh LKPP, diketahui Pemerintah Daerah ABC memiliki data sebagai berikut:

NO	Data Pemerintah Daerah ABC	Nilai
1.	RUP Penyedia	Rp303.786.004.332
2.	RUP PDN	Rp303.770.846.332
3.	Realisasi Penyedia	Rp184.255.211.971
4.	Realisasi PDN	Rp178.417.984.183
5.	% Rencana PDN (2/1)	99,9%
6.	% Realisasi PDN (4/3)	96,8%
7.	% Capaian Target PDN (4/2)	58,7%
8.	Skor ITKP	Baik

Perhitungan RB Tematik Pemerintah daerah ABC sebagai berikut:

1) (Filter)

Pemerintah Daerah ABC telah memenuhi filter/persyaratan dasar yakni RUP PDN minimal 40% (nomor 5 pada tabel di atas).

2) (Aspek Penilaian)

Selanjutnya, untuk pemberian bobot RB Tematik Penggunaan PDN, karena Pemerintah Daerah ABC memiliki realisasi penyedia < Rp. 500 Miliar maka berlaku Kondisi II yakni bobot awal 1 poin dan bobot realisasi PDN adalah 2 poin. Nilai RB Tematik Pemerintah Daerah ABC adalah persentase realisasi PDN (nomor 6) yakni 96,8% dikali bobot tematik 2 poin sehingga diperoleh 1,936 poin, angka tersebut ditambahkan 1 bobot awal sehingga diperoleh poin sebesar 2,936.

3) (Skor Pengali)

Nilai tersebut akan dikalikan dengan skor pengali 50% (karena Pemerintah Daerah ABC memiliki Skor ITKP Baik namun % Capaian target PDN (nomor 7) kurang dari 75%.

Sehingga skor RB Tematik Penggunaan PDN Pemerintah Daerah ABC adalah **1,47 poin**.

V. Pemetaan Peran Kementerian/Lembaga dalam Reformasi Birokrasi Tematik

No	Kementerian/ Lembaga	Tema				
		Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Investasi	Digitalisasi Adm Pemerintahan (Penanganan Stunting)	Pengendalian Inflasi	Penggunaan PDN
1	Kementerian Agama	IA	SA	IA	SA	SA
2	Kementerian Keuangan	IA	IA	IA	IA	IA
3	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	IA	SA	IA	SA	IA
4	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	IA	SA	SA	EA	IA
5	Kementerian Luar Negeri	SA	SA	SA	SA	SA
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	IA	SA	IA	IA	SA
7	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	IA	SA	IA	SA	SA
8	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	IA	SA	SA	IA	IA
9	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	IA	SA	SA	SA	IA
10	Kementerian Perdagangan	IA	IA	SA	IA	IA
11	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	IA	EA	IA	IA	IA
12	Kementerian Perhubungan	SA	SA	SA	IA	SA
13	Kementerian Perindustrian	IA	IA	SA	EA	IA

No	Kementerian/ Lembaga	Tema				
		Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Investasi	Digitalisasi Adm Pemerintahan (Penanganan Stunting)	Pengendalian Inflasi	Penggunaan PDN
14	Kementerian Pertahanan	SA	SA	SA	SA	SA
15	Kementerian Pertanian	IA	SA	SA	IA	SA
16	Kementerian Dalam Negeri	IA	EA	IA	IA	IA
17	Kementerian Sekretariat Negara	SA	SA	IA	SA	SA
18	Kementerian Sosial	IA	SA	IA	EA	SA
19	Kementerian Ketenagakerjaan	IA	SA	SA	SA	SA
20	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	IA	SA	SA	SA	IA
21	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	IA	IA	SA	SA	SA
22	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	IA	SA	SA	SA	SA
23	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	IA	IA	SA	IA	SA
24	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	IA	SA	IA	SA	SA
25	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	SA	SA	SA	SA	SA
26	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	IA	SA	SA	IA	SA
27	Kementerian Kesehatan	IA	SA	IA	SA	IA

No	Kementerian/ Lembaga	Tema				
		Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Investasi	Digitalisasi Adm Pemerintahan (Penanganan Stunting)	Pengendalian Inflasi	Penggunaan PDN
28	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	SA	SA	SA	SA	SA
29	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	SA	SA	SA	SA	SA
30	Badan Riset dan Inovasi Nasional	SA	SA	SA	SA	IA
31	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	SA	SA	SA	SA	SA
32	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	SA	SA	IA	SA	SA
33	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	SA	SA	SA	SA	SA
34	Badan Pusat Statistik	IA	SA	SA	EA	IA
35	Badan Standardisasi Nasional	SA	SA	SA	SA	SA
36	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	SA	SA	SA	SA	SA
37	Komisi Pemberantasan Korupsi	SA	SA	SA	SA	SA
38	Komisi Pemilihan Umum	SA	SA	SA	SA	SA
39	Lembaga Administrasi Negara	SA	SA	SA	SA	SA
40	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	SA	SA	SA	SA	IA
41	Badan Kependudukan Dan Keluarga	IA	SA	IA	SA	SA

No	Kementerian/ Lembaga	Tema				
		Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Investasi	Digitalisasi Adm Pemerintahan (Penanganan Stunting)	Pengendalian Inflasi	Penggunaan PDN
	Berencana Nasional					
42	Mahkamah Agung Republik Indonesia	SA	SA	SA	SA	SA
43	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	SA	SA	SA	SA	SA
44	Perpustakaan Nasional	SA	SA	SA	SA	SA
45	Kejaksaan Republik Indonesia	SA	SA	SA	SA	SA
46	Kepolisian Negara Republik Indonesia	IA	SA	SA	IA	SA
47	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	SA	SA	SA	SA	SA
48	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	SA	SA	SA	SA	SA
49	Badan Narkotika Nasional	SA	SA	SA	SA	SA
50	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SA	SA	SA	SA	SA
51	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	SA	SA	SA	SA	SA
52	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	EA	EA	EA	EA	IA
53	Komisi Yudisial	SA	SA	SA	SA	SA
54	Tentara Nasional Indonesia	IA	SA	SA	SA	SA
55	Sekretariat Kabinet	SA	SA	SA	IA	SA

No	Kementerian/ Lembaga	Tema				
		Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Investasi	Digitalisasi Adm Pemerintahan (Penanganan Stunting)	Pengendalian Inflasi	Penggunaan PDN
56	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	SA	SA	SA	SA	SA
57	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	SA	SA	SA	SA	SA
58	Badan Siber dan Sandi Negara	SA	SA	SA	SA	SA
59	Badan Intelijen Negara	SA	SA	SA	SA	SA
60	Badan Keamanan Laut	SA	SA	SA	SA	SA
61	Badan Kepegawaian Negara	SA	SA	SA	SA	SA
62	Arsip Nasional Republik Indonesia	SA	SA	SA	SA	SA
63	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	SA	SA	SA	SA	SA
64	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	SA	SA	SA	SA	SA
65	Lembaga Ketahanan Nasional	SA	SA	SA	SA	SA
66	Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	SA	SA	SA	SA	SA
67	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SA	SA	SA	SA	SA
68	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	SA	SA	SA	SA	SA
69	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	SA	SA	SA	SA	SA
70	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	SA	SA	SA	SA	SA

No	Kementerian/ Lembaga	Tema				
		Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Investasi	Digitalisasi Adm Pemerintahan (Penanganan Stunting)	Pengendalian Inflasi	Penggunaan PDN
71	Ombudsman Republik Indonesia	SA	SA	SA	SA	SA
72	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	IA	EA	SA	IA	IA
73	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	SA	SA	SA	SA	SA
74	Badan Pemeriksa Keuangan	EA	EA	EA	EA	SA
75	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	IA	EA	EA	EA	IA
76	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	SA	SA	SA	SA	SA
77	Badan Informasi Geospasial	SA	SA	SA	SA	SA
78	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SA	SA	SA	SA	SA
79	Kementerian Pemuda dan Olahraga	SA	SA	SA	SA	SA
80	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SA	SA	SA	SA	SA
81	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	EA	IA	SA	EA	IA
82	Badan Pangan Nasional	SA	SA	SA	IA	SA

Keterangan:IA : *Implementing agency*SA : *Supporting agency*EA : *Enabling agency*

Sumber data:

1.	Tematik Pengentasan Kemiskinan	:	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2.	Tematik Realisasi Investasi	:	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3.	Tematik Digitalisasi Pemerintahan dengan fokus Penanganan Stunting:	:	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4.	Tematik Prioritas Aktual Presiden dengan fokus:		
	a. Penggunaan Produk Dalam Negeri	:	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
	b. Pengendalian Inflasi	:	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rujukan regulasi:

1.	Tematik Pengentasan Kemiskinan	:	Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2.	Tematik Realisasi Investasi	:	Keppres No 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi Inpres No 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha
3.	Tematik Digitalisasi Pemerintahan dengan fokus Penanganan Stunting:	:	Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
4.	Tematik Prioritas Aktual Presiden dengan fokus:		

a. Penggunaan Produk Dalam Negeri	:	Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
b. Pengendalian Inflasi	:	Keppres No 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional Keputusan Menko Perekonomian No 313 Tahun 2023

VI. Koefisien Penilaian

Koefisien adalah penambahan atau pengurangan atas hasil RB General yang berdasarkan pada beberapa variabel.

NO	KOEFISIEN	PENJELASAN	KRITERIA	GRADING KOEFISIEN
1	Terdapat kejadian KKN	Segala jenis praktik KKN, baik di unit kerja maupun instansi pemerintah, yang dilakukan oleh pegawai, baik staf maupun pimpinan, dan telah memiliki putusan pengadilan.	Melibatkan pimpinan instansi dan birokrasi (bersifat sistematis)	-5% dan tidak dapat naik predikat pada tahun berjalan
			Melibatkan beberapa orang yang memiliki posisi/jabatan tinggi dalam birokrasi	-4%
			Melibatkan pimpinan instansi saja	-3%
			Terjadi di satu unit kerja (melibatkan pimpinan unit kerja beserta pegawai)	-2,5%
			Melibatkan pegawai (oknum) saja baik di pusat maupun unit kerja	-2%
2	Tingkat kualitas implementasi kebijakan	Kualitas implementasi kebijakan meso dilihat dari persentase instansi pemerintah yang telah	Kondisi prasyarat: 1. Penilaian dilakukan secara populasi 2. Telah menginput hasil	<ul style="list-style-type: none"> +2% jika memenuhi target baik di atas 60% -1%, jika target

NO	KOEFISIEN	PENJELASAN	KRITERIA	GRADING KOEFISIEN
	meso	memiliki nilai "Baik" pada suatu indikator tertentu.	penilaian melalui Portal RB Nasional	baik < 25%
3	Capaian Stranas PK	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Stranas PK	-	<ul style="list-style-type: none"> • Hijau +2% • Kuning +1% • Merah 0
4	Transformasi Layanan Publik Digital (MPP Digital)	Transformasi layanan publik digital dilihat dari persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan Mal Pelayanan Publik Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. penilaian dilakukan kepada Kabupaten/Kota yang telah menerapkan MPP Digital 2. Kabupaten/Kota tersebut telah memproses layanan melalui MPP Digital 3. Penilaian berdasarkan pada kualitas proses layanan dan kuantitas penyelenggaraan MPP Digital 	<ul style="list-style-type: none"> • +2% : "Sangat Baik" bila layanan yang diajukan melalui MPP Digital selesai 100 persen • +1% : "Baik" bila layanan yang diajukan melalui MPP Digital selesai 60 persen • 0 : "Kurang Baik" bila layanan yang diajukan melalui MPP Digital selesai di bawah 60 persen

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2024

PELAPORAN EVALUASI EKSTERNAL OLEH EVALUATOR MESO

Dalam pelaksanaan evaluasi RB Tahun 2024, kementerian/lembaga yang termasuk dalam Evaluator Meso perlu melakukan input melalui Portal RB Nasional dan menyampaikan surat pernyataan bahwa hasil evaluasi telah selesai dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah terkait. Muatan yang perlu dilaporkan kepada Instansi Pemerintah melalui Portal RB Nasional setidaknya mencakup beberapa hal berikut:

INFORMASI	PENJELASAN
Hasil Penilaian	Evaluator Meso menyampaikan hasil penilaian implementasi kebijakan meso pada Portal RB Nasional.
Catatan	<p>Evaluator Meso memberikan catatan atas hasil penilaian implementasi kebijakan meso pada Portal RB Nasional. Catatan tersebut setidaknya memuat hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran interpretasi hasil penilaian yang telah dilakukan; 2. Upaya yang telah dilakukan, kendala, dan/atau kunci keberhasilan apabila terjadi peningkatan atau kendala ketika terjadi penurunan yang signifikan; dan 3. Informasi terkait komponen penilaian yang masih rendah apabila dibandingkan dengan komponen lainnya, atau komponen yang menurun nilainya. Informasi ini paling tidak memuat 1-3 komponen yang perlu menjadi perhatian instansi pemerintah yang dinilai.

Rekomendasi	<p>Evaluator Meso memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil penilaian implementasi kebijakan meso pada Portal RB Nasional. Rekomendasi yang diberikan setidaknya memuat dua hal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan perbaikan yang dapat memberikan solusi apabila terdapat kendala atau permasalahan yang termuat pada poin 2 pada "Catatan"; dan 2. Rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pada komponen penilaian yang dianggap masih kurang.
--------------------	--

Informasi yang disampaikan ke dalam Portal RB Nasional adalah informasi yang bersifat final, sehingga seluruh informasi dari Evaluator Meso yang termuat dalam Portal RB Nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab Evaluator Meso selaku pengampu data. Apabila terdapat perbedaan data, anomali data, atau terdapat hal-hal lain yang menimbulkan bias informasi, Evaluator Nasional akan melakukan konfirmasi lebih lanjut dengan Evaluator Meso.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2024

KELENGKAPAN EVALUASI INTERNAL

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) perlu melakukan input melalui sistem informasi RB nasional atau Portal RB Nasional untuk dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan RB tahun 2024. Informasi yang harus diinput, antara lain:

1. Rencana aksi; dan
2. Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI).

Rencana aksi yang diinput adalah rencana aksi RB General dan rencana aksi RB Tematik sesuai dengan tema yang dipilih untuk tahun 2024. Contoh format rencana aksi dapat dilihat melalui Modul Pembangunan RB Mikro.

LHEI adalah laporan yang berisi catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan RB internal K/L/D, khususnya pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan pelaksanaan atas rencana aksi RB (*on-going*). Pelaporan hasil evaluasi internal tahun 2024 disampaikan melalui Portal RB Nasional. Adapun format LHEI yang dapat digunakan oleh K/L/D adalah sebagai berikut.

Format LHEI Ex-Ante

Nomor	:	<i>(nomor surat)</i>	<i>(tanggal bulan tahun)</i>
Hal	:	Hasil Evaluasi <i>Ex-Ante</i> Reformasi Birokrasi Tahun 20XX	

Yth. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah**di****tempat**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023, Evaluator Internal (*nama instansi pemerintah*) telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan RB (RB) di (*nama instansi pemerintah*).

Tujuan evaluasi untuk memastikan *Road Map* dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di (*nama instansi pemerintah*), memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan (*nama instansi pemerintah*).

Evaluasi internal dilakukan melalui ... (*penjelasan secara ringkas gambaran umum mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh evaluator internal dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana tahapan/ strategi/ pola/ metode evaluasi dilakukan*).

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasil evaluasi internal RB di lingkungan Nama K/L/D adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum pelaksanaan RB K/L/D

berisi tentang capaian positif dan capaian yang masih memerlukan peningkatan (area of improvement), terkait dengan capaian indikator sasaran RB dan capaian indikator kegiatan utama.

2. Catatan atas perencanaan RB baik di level instansi maupun di level unit kerja dapat berisi hal-hal berikut:
 - i. informasi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi RB tahun sebelumnya
 - ii. catatan atas kualitas Road Map RB dan Rencana Aksi RB K/L/D (mengacu pada kriteria penilaian TPN atas kualitas dokumen perencanaan RB)
3. Rekomendasi berisi rekomendasi perbaikan konkret untuk ditindaklanjuti oleh K/L/D berdasarkan catatan atas kualitas Road Map RB dan Rencana Aksi RB K/L/D

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan (nama instansi pemerintah).

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Pimpinan Instansi, kami ucapkan terima kasih.

**Penanggung Jawab Evaluator
Internal K/L/D,**

(Jabatan)

(Nama)

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Format LHEI On-Going

Nomor	:	<i>(nomor surat)</i>	<i>(tanggal bulan tahun)</i>
Hal	:	Hasil Evaluasi <i>On Going</i> Reformasi Birokrasi Tahun 20XX Triwulan ke-XX	

Yth. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah**di****tempat**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* RB Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023, Evaluator Internal (*nama instansi pemerintah*) telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan RB (RB) di (*nama instansi pemerintah*).

Tujuan evaluasi untuk memastikan *Road Map* dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di (*nama instansi pemerintah*), memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan (*nama instansi pemerintah*).

Evaluasi internal dilakukan melalui ... (*penjelasan secara ringkas gambaran umum mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh evaluator internal dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana tahapan/ strategi/ pola/ metode evaluasi dilakukan*).

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, hasil evaluasi internal RB di lingkungan Nama K/L/D adalah sebagai berikut:

1. Catatan atas pelaksanaan Rencana Aksi RB, berisi tentang ketercapaian target-target Rencana Aksi (*output dan waktu*), kualitas kegiatan terhadap ekspektasi Rencana Aksi RB, dan kualitas manajemen dalam pelaksanaan RB.

2. Rekomendasi berisi rekomendasi perbaikan konkret untuk ditindaklanjuti oleh K/L/D berdasarkan atas catatan pelaksanaan Rencana Aksi RB K/L/D

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan *(nama instansi pemerintah)*.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Pimpinan Instansi, kami ucapkan terima kasih.

**Penanggung Jawab Evaluator
Internal K/L/D,**

(Jabatan)

(Nama)

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

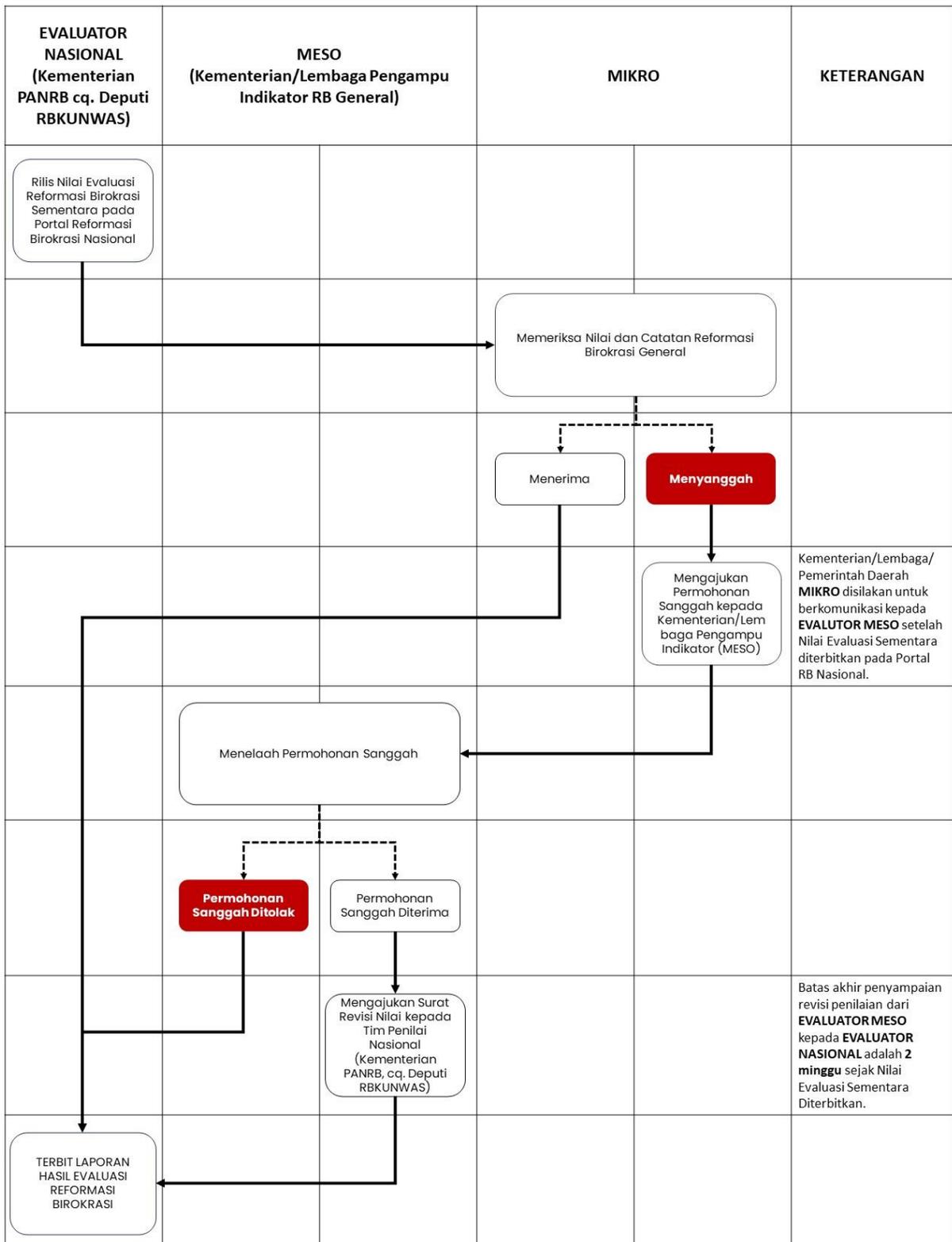
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

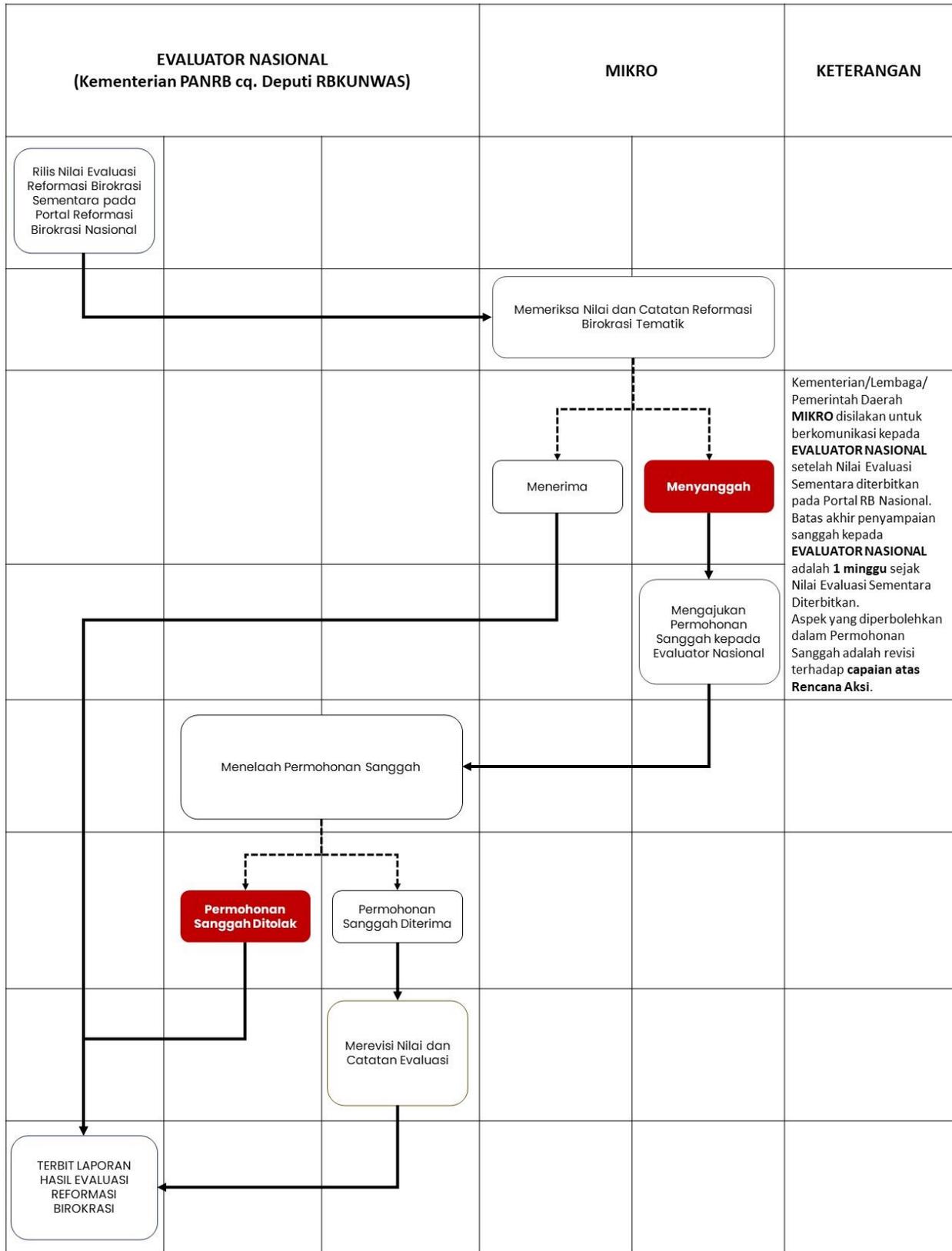


LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 182 TAHUN 2024
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI
 REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2024

**MEKANISME SANGGAH HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
 GENERAL**



**MEKANISME SANGGAH HASIL
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK**



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS